

Buku, Jurnal, Laporan Hasil Penelitian

Agrianto, Setiawan Bima, “Kekuatan Pembuktian Fotokopi Akta Jual Beli sebagai Alat Bukti dalam Sengketa Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931K/PDT/2016)”, *Jurnal Verstek*, Vol 7, No. 3, 2019, hlm. 193 – 201.

Astuti Chandra Ayu, Anis Chairi, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.4, Nr 3, 2015, hlm. 1-12.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, “Arti Penting Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata”, *Mimbar Hukum*, Vol 22, No 2, Juni, 2010, hlm 347-369.

_____, “Asas Praduga Tak Bersalah: Penerapan dan Pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September, 2011, hlm 470-479.

Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1975, *Perbuatan Melawan Hukum*, Padnya Paramita, Jakarta.

Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme, Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fauzan, H.M., 2015, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru dalam Hukum Kasus*, Kencana Jakarta.

Fuady, Munir, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung.

Greenberg, Theodore S., et al, 2009, *Stolen Asset Recovery a Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, World Bank, Washington.

Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2017, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- _____, 2019, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hendarta, Tony Tri, 2014, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 02/Pdt.G/2010/Pn.Dpk Mengenai Kedudukan Ahli Waris Dalam Gugatan Penggantian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi*, Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Herawati, Vivin Endah Tri, 2008, *Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- _____, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hiariej, Edward. O.S., “Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta 30 Januari 2012.
- Hidayat. Rahmat, 2016, *Gugatan Perdata Ganti Rugi Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Terdakwanya Meninggal Dunia*, Skripsi, Penulisan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Bandung.
- Latif, H. Abdul, 2014, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Pernada Media Group, Jakarta,
- Lengkong, Lonna Yohanes, “Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil Pada Perkara Perdata dalam Persepektif Hukum Pembuktian Perdata”, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol.3, No.1, April, 2017, hlm 479-492.
- Makawimbang, Hernold Ferry, 2014, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Progresif*, Thafa Media, Jogjakarta.
- Meitinah, “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan yang Telah Memperoleh Legalisasi dari Notaris”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36, No. 4, Oktober-Desember, 2006, hlm 443-468.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Mertokusumo, Sukirno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi kedelapan*, Liberty, Jogjakarta.

**ANALISIS PEMBUKTIAN GUGATAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DENGAN
ALAT BUKTI PUTUSAN
PENGADILAN PIDANA (STUDI KASUS NOMOR 02/PDT.G/2010/PN.DPK JO. NOMOR
51/PDT/2011/PT.BDG)**

EDWIN ADI NUGROHO, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2020. Diunduh dari <http://eprints.ugm.ac.id/>

_____, 2019, *Perbuatan melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

Moeljatno, 1985, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta.

Moumat, Octavianus M., “Alat Bukti Tulisan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan”, *Lex Privatum*, Vol. II, No. 1, Januari-Maret, 2014, hlm 134-143.

Nur, Aco, et, al 2015, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Stratrgi Pemberantasan Korupsi*, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahakamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Panggabean, H. M., 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori, Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, Bhuana Ilmu Popiuler, Jakarta.

Porajow, David Fredriek Albert, *Non- Conviction Baser Asset Forfeiture Sebagai Alternative Memperoleh Kembali Kekayaan Negara Yang Hilang Karena Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perekonomian Negara*, Tesis, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Pacasrjana Magister Hukum,

Prakoso, Djoko, 1988, *Pemecahan Perkara Pidana (splitsing)*, Liberty, Yogyakarta.

Pramono, Dedy, “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, Desember, 2015, hlm 248-258.

Projodikoro, Wirjono, 1985, *Hukum Acara Pidana Indonesia Cetakan ke-XII*, Sumbur, Bandung.

Remelink, Jan, 2004, *Hukum Pidana Material 1*, diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono, Maharsa, Yogyakarta.

Satyawan, Made Dudy, Khusna, Mengungkap Korupsi Melalui Bukti Audit Menjadi Bukti Menurut Hukum, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 8, No. 1, April, 2017, hlm 183-199.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Sitompoel, Honna P.D., 2016, *Pembuktian Asse*

**ANALISIS PEMBUKTIAN GUGATAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DENGAN
ALAT BUKTI PUTUSAN
PENGADILAN PIDANA (STUDI KASUS NOMOR 02/PDT.G/2010/PN.DPK JO. NOMOR
51/PDT/2011/PT.BDG)**

EDWIN ADI NUGROHO, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada 2020. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
Korupsi Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Indonesia, Disertasi, Program
Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soeikromo, Deasy, “Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. II, No. 1, Januari-Maret, 2014, hlm 124-136.

Soepomo, R., 1952, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Fasco, Jakarta.

Soeroso, R., 2010, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 4 Tentang Pembuktian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 1975, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sunarto, “Prinsip hakim aktif dalam perkara perdata”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 5, No. 2, Juli, 2016, hlm 249-276.

Tjondropurtanto Handoko, “KUHAP Tidak membenaran Pemecahan (Splitsing) pada Satu Perkara Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 24, No. 3, Juni, 1994, hlm 242-250.

Wardani, Peny Candra, *Akta Otentik sebagai Alat Bukti di Pengadilan*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Airlangga Surabaya.

Wijayanta, Tata, et. al, “Penerpan Prinsip Hakim Aktif dan Pasif serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, Oktober, 2010, 472-487.

Wiyono, R, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Vollmar, H.F.A., 1984, *Pengantar Studi Ilmu Hukum Perdata jilid II*, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, CV. Rajawali, Jakarta.

Yunthio, Emerson, dkk, 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Hasil Penelitian, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Staatsblaad* 1847-23.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Staatsblad* 1915-. 732.

Het Herziene Indonesisch Reglement, (*Staatsblad* 1941-44).

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En. Madura
Staatsblad, 1927-227.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah oleh. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4150).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil
And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against
Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 85, Tembahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
4654).



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**ANALISIS PEMBUKTIAN GUGATAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DENGAN
ALAT BUKTI PUTUSAN
PENGADILAN PIDANA (STUDI KASUS NOMOR 02/PDT.G/2010/PN.DPK JO. NOMOR
51/PDT/2011/PT.BDG)**

EDWIN ADI NUGROHO, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada 2020. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400).

International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undnag-Undnag Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 23 Oktober 2012.

Putusan Mahkamah Agung, Nomor 102K/SIP/1972, Perihal sengketa Kasrim dkk melawan Siti Mas'um, 30 Juli 1973.

Putusan Pengadilan Negeri, Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.Dpk jo. Putusan 51/Pdt/2011/PT.Bdg. Perihal sengketa Kejaksaan Agung melawan Ny. Juli Tukiman, Abed Nego, Jacob Setiawan dan Lidia Margareta, 14 Maret 2011.

Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerugian>, diakses pada tanggal 9 Juli 2020.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rugi>, diakses pada tanggal 9 Juli 2020.

Wawancara

Arqom, Zahru, 2020, Pembuktian Gugatan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dengan Putusan Pengadilan Pidana, *Wawancara*, Yogyakarta, 4 Maret.

Supandriyo, 2020, Pembuktian Gugatan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dengan Putusan Pengadilan Pidana, *Wawancara*, Yogyakarta, 7 Mei.

Buku, Jurnal, Laporan Hasil Penelitian

Agrianto, Setiawan Bima, “Kekuatan Pembuktian Fotokopi Akta Jual Beli sebagai Alat Bukti dalam Sengketa Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931K/PDT/2016)”, *Jurnal Verstek*, Vol 7, No. 3, 2019, hlm. 193 – 201.

Astuti Chandra Ayu, Anis Chairi, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.4, Nr 3, 2015, hlm. 1-12.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, “Arti Penting Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata”, *Mimbar Hukum*, Vol 22, No 2, Juni, 2010, hlm 347-369.

_____, “Asas Praduga Tak Bersalah: Penerapan dan Pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September, 2011, hlm 470-479.

Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1975, *Perbuatan Melawan Hukum*, Padnya Paramita, Jakarta.

Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme, Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fauzan, H.M., 2015, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru dalam Hukum Kasus*, Kencana Jakarta.

Fuady, Munir, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung.

Greenberg, Theodore S., et al, 2009, *Stolen Asset Recovery a Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, World Bank, Washington.

Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2017, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- _____, 2019, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hendarta, Tony Tri, 2014, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 02/Pdt.G/2010/Pn.Dpk Mengenai Kedudukan Ahli Waris Dalam Gugatan Penggantian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi*, Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Herawati, Vivin Endah Tri, 2008, *Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- _____, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hiariej, Edward. O.S., “Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta 30 Januari 2012.
- Hidayat. Rahmat, 2016, *Gugatan Perdata Ganti Rugi Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Terdakwanya Meninggal Dunia*, Skripsi, Penulisan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Bandung.
- Latif, H. Abdul, 2014, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Pernada Media Group, Jakarta,
- Lengkong, Lonna Yohanes, “Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil Pada Perkara Perdata dalam Persepektif Hukum Pembuktian Perdata”, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol.3, No.1, April, 2017, hlm 479-492.
- Makawimbang, Hernold Ferry, 2014, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Progresif*, Thafa Media, Jogjakarta.
- Meitinah, “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan yang Telah Memperoleh Legalisasi dari Notaris”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36, No. 4, Oktober-Desember, 2006, hlm 443-468.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Mertokusumo, Yogyakarta

**ANALISIS PEMBUKTIAN GUGATAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DENGAN
ALAT BUKTI PUTUSAN
PENGADILAN PIDANA (STUDI KASUS NOMOR 02/PDT.G/2010/PN.DPK JO. NOMOR
51/PDT/2011/PT.BDG)**

EDWIN ADI NUGROHO, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2020. Diunduh dari <http://eja.repository.ugm.ac.id/>
Mertokusumo, Yogyakarta, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi kedelapan*, Liberty,
Jogyakarta.

_____, 2019, *Perbuatan melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Maha Karya
Pustaka, Yogyakarta.

Moeljatno, 1985, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Bina
Aksara, Jakarta.

Moumat, Octavianus M., "Alat Bukti Tulisan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di
Pengadilan", *Lex Privatum*, Vol. II, No. 1, Januari-Maret, 2014, hlm 134-143.

Nur, Aco, et, al 2015, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Stratrgi Pemberantasan
Korupsi*, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Panggabean, H. M., 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori, Praktik dan
Yurisprudensi di Indonesia*, Bhuana Ilmu Popiuler, Jakarta.

Porajow, David Fredriek Albert, *Non- Conviction Baser Asset Forfeiture Sebagai Alternative
Memperoleh Kembali Kekayaan Negara Yang Hilang Karena Tindak Pidana Yang
Berkaitan Dengan Perekonomian Negara*, Tesis, Universitas Indonesia, Fakultas
Hukum, Program Pacasrjana Magister Hukum,

Prakoso, Djoko, 1988, *Pemecahan Perkara Pidana (splitsing)*, Liberty, Yogyakarta.

Pramono, Dedy, "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum
Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, Desember,
2015, hlm 248-258.

Projodikoro, Wirjono, 1985, *Hukum Acara Pidana Indonesia Cetakan ke-XII*, Sumbur,
Bandung.

Remelink, Jan, 2004, *Hukum Pidana Material 1*, diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono,
Maharsa, Yogyakarta.

Satyawan, Made Dudy, Khusna, Mengungkap Korupsi Melalui Bukti Audit Menjadi Bukti
Menurut Hukum, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 8, No. 1, April, 2017, hlm
183-199.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Sitompoe, Honna P.D., 2016, *Pembuktian Asse*

**ANALISIS PEMBUKTIAN GUGATAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DENGAN
ALAT BUKTI PUTUSAN
PENGADILAN PIDANA (STUDI KASUS NOMOR 02/PDT.G/2010/PN.DPK JO. NOMOR
51/PDT/2011/PT.BDG)**

EDWIN ADI NUGROHO, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada 2020. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
Sitompoe, Honna P.D., 2016, *Pembuktian Asse Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Indonesia*, Disertasi, Program
Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soeikromo, Deasy, "Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. II, No. 1, Januari-Maret, 2014, hlm 124-136.

Soepomo, R., 1952, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Fasco, Jakarta.

Soeroso, R., 2010, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 4 Tentang Pembuktian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 1975, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sunarto, "Prinsip hakim aktif dalam perkara perdata", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 5, No. 2, Juli, 2016, hlm 249-276.

Tjondropurtanto Handoko, "KUHAP Tidak membenaran Pemecahan (Splitsing) pada Satu Perkara Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 24, No. 3, Juni, 1994, hlm 242-250.

Wardani, Peny Candra, *Akta Otentik sebagai Alat Bukti di Pengadilan*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Airlangga Surabaya.

Wijayanta, Tata, et. al, "Penerpan Prinsip Hakim Aktif dan Pasif serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, Oktober, 2010, 472-487.

Wiyono, R, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Vollmar, H.F.A., 1984, *Pengantar Studi Ilmu Hukum Perdata jilid II*, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, CV. Rajawali, Jakarta.

Yunthio, Emerson, dkk, 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Hasil Penelitian, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Staatsblaad* 1847-23.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Staatsblad* 1915-. 732.

Het Herziene Indonesisch Reglement, (*Staatsblad* 1941-44).

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En. Madura
Staatsblad, 1927-227.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah oleh. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4150).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil
And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against
Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 85, Tembahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
4654).



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**ANALISIS PEMBUKTIAN GUGATAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DENGAN
ALAT BUKTI PUTUSAN
PENGADILAN PIDANA (STUDI KASUS NOMOR 02/PDT.G/2010/PN.DPK JO. NOMOR
51/PDT/2011/PT.BDG)**

EDWIN ADI NUGROHO, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2020. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400).

International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undnag-Undnag Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 23 Oktober 2012.

Putusan Mahkamah Agung, Nomor 102K/SIP/1972, Perihal sengketa Kasrim dkk melawan Siti Mas'um, 30 Juli 1973.

Putusan Pengadilan Negeri, Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.Dpk jo. Putusan 51/Pdt/2011/PT.Bdg. Perihal sengketa Kejaksaan Agung melawan Ny. Juli Tukiman, Abed Nego, Jacob Setiawan dan Lidia Margareta, 14 Maret 2011.

Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerugian>, diakses pada tanggal 9 Juli 2020.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rugi>, diakses pada tanggal 9 Juli 2020.

Wawancara

Arqom, Zahru, 2020, Pembuktian Gugatan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dengan Putusan Pengadilan Pidana, *Wawancara*, Yogyakarta, 4 Maret.

Supandriyo, 2020, Pembuktian Gugatan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dengan Putusan Pengadilan Pidana, *Wawancara*, Yogyakarta, 7 Mei.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**ANALISIS PEMBUKTIAN GUGATAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DENGAN
ALAT BUKTI PUTUSAN
PENGADILAN PIDANA (STUDI KASUS NOMOR 02/PDT.G/2010/PN.DPK JO. NOMOR
51/PDT/2011/PT.BDG)**

EDWIN ADI NUGROHO, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>